

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah lagi dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia belum menggambarkan hasilnya secara baik walaupun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini sudah dijalankan lebih dari sepuluh tahun. Ada ketidakseimbangan antara kapabilitas daerah yang belum terbangun kuat dengan otoritas yang dilimpahkan pada pemerintah daerah yang besar. Selain itu tiap daerah memiliki pendapatan (kekayaan) yang berbeda beda yang terkadang belum tentu mampu untuk menopang otoritas yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada daerah tersebut.

Dilihat dari sisi akuntabilitas yang masih lemah, dan pengawasan dari pusat ke daerah belum berjalan secara efektif. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan akuntabel apabila dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) tersistem dengan baik. Pengelolaan APBD yang baik akan menghasilkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang akuntabel. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu laporan yang digunakan dalam penilaian kinerja suatu daerah. Tentunya tidak lepas dari evaluasi kinerja. Evaluasi ialah sebuah cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Selain keperluan evaluasi kinerja. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tatanan *good governance*. Yang didalamnya terkandung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. UU No.15/2004 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan atas hasil pemeriksaan keuangan tersebut akan memuat opini atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hasil pemeriksaan BPK atas temuan audit dibagi menjadi dua, yaitu temuan audit atas sistem pengendalian intern dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, menunjukkan

semakin rendahnya kinerja suatu Pemda. Menurut Renas (2014) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja, sedangkan ukuran daerah, belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Adapun Marfiana dan Kurniasih (2013) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat kekayaan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Parwanto dan Harto (2017) mengatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Rozy dan Wijayanti (2014) mengatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Syahputra (2017) menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Susilawati (2016) dalam penelitiannya mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuan audit. Sementara Utomo (2015) mengatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja modal serta temuan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian “PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, DAN TEMUAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Pulau Jawa 2015-2016)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan:

1. Apakah derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kota?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kota?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kota?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kota?
5. Apakah temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kinerja pemerintah daerah kota.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah kota.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kota.
4. Untuk menganalisis opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah kota

5. Untuk menganalisis temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kota.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat dari berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini dapat menyumbang gagasan mengenai karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan temuan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai langkah perbaikan dan meningkatkan kinerja dimasing masing pemerintah daerah.

2. Bagi Masyarakat umum

Memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu literatur untuk melaksanakan penelitian berikutnya juga melengkapi dari penelitian sebelumnya.

4. Bagi Penulis

Bahan pembelajaran bagi penulis dalam menambah wawasan keilmuan serta mengembangkan potensi penelitian terkait dengan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memaparkan mengenai teori-teori yang mendasari pengaruh kinerja pemerintah daerah yaitu teori keagenan, kinerja pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, desentralisasi fiskal, hasil pemeriksaan audit BPK, pembahasann mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab iv memaparkan tentang hasil pengumpulan data, analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian dan saran